

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi pedoman sebagai penelitian yang sedang dilakukan dengan tujuan memperoleh inspirasi terhadap langkah-langkah penelitian berikutnya. Selain itu, penelitian terdahulu menjadi perbandingan dan acuan dalam melakukan penelitian, untuk mencegah adanya anggapan kesamaan maka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

2.1.1. Penelitian Terdahulu 1

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Oki Irawa Saputri (2023) dengan judul "Representasi Feminisme dalam Film (Analisis Semiotika dalam Film "Fifty Shades of Grey" Seri I dan II) mengkaji bagaimana simbol-simbol feminisme direpresentasikan dalam kedua seri film tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian kualitatif interpretatif yang bertujuan untuk memahami cara film "Fifty Shades of Grey" seri I dan II menggambarkan perjuangan feminisme (Irawa, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa feminisme dalam film tersebut digambarkan melalui perjuangan tokoh utama perempuan dalam memperoleh hak untuk mengontrol tubuhnya dan menyetarakan status sosialnya. Tokoh perempuan tersebut berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman patriarki dan seksisme yang diwakili oleh tokoh laki-laki serta berusaha mengubah posisinya dari seorang budak menjadi seorang kekasih yang setara. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana tema feminisme dapat diinterpretasikan melalui narasi dan karakterisasi dalam film, sekaligus menyoroti tantangan yang dihadapi oleh tokoh perempuan dalam mengatasi struktur sosial yang menindas (Irawa, 2023).

2.1.2. Penelitian Terdahulu 2

Penelitian terdahulu oleh July Susanti BR (2021) berjudul "Analisis Semiotika Representasi Feminisme dalam Film Mulan 2020" berfokus pada bagaimana feminisme direpresentasikan melalui berbagai tanda dan makna dalam film tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis semiotik untuk mengungkap pesan-pesan feminisme yang terkandung dalam film "Mulan" versi 2020 (July Susanti BR, 2021).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat enam adegan utama yang menonjolkan representasi feminisme dalam film tersebut. Film ini berhasil menantang stereotip gender yang berkembang di masyarakat, terutama pandangan yang menggambarkan perempuan sebagai makhluk yang lemah, tidak dapat diandalkan, dan tidak mampu belajar bela diri. Sebaliknya, karakter utama, Mulan, digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, cerdas, pantang menyerah, dan berani. Meskipun film ini menggambarkan kekuatan dan kemandirian, feminisme yang disajikan tetap mempertahankan sisi feminin karakter Mulan yang terlihat melalui pilihan busana dan momen emosional, seperti ketika Mulan menangis setelah dikeluarkan dari resimen. Penelitian ini menekankan bahwa film "Mulan (2020)" tidak hanya mengangkat isu feminisme, tetapi juga melakukannya tanpa menghilangkan sifat-sifat kodrati perempuan (July Susanti BR, 2021).

2.1.3. Penelitian Terdahulu 3

Penelitian terdahulu oleh Sabrina Maulidina berjudul "Representasi Feminisme dalam Film 3 Srikandi (Studi Analisis Semiotika)" mengkaji bagaimana konsep feminisme direpresentasikan dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita karya Robby Ertanto Soediskam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis semiotik untuk memahami pesan-pesan feminisme yang disampaikan melalui karakter-karakter wanita dalam film tersebut (Maulidina, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa feminisme dalam film ini digambarkan melalui karakter wanita yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip feminisme. Para tokoh perempuan dalam film berjuang untuk memperoleh hak-hak mereka dan melawan berbagai bentuk penindasan, termasuk seks bebas, dominasi laki-laki, dan poligami. Film ini menyoroti perjuangan perempuan untuk mendapatkan kebebasan dan kesetaraan dalam menghadapi struktur sosial yang patriarkal (Maulidina, 2020).

2.2. Komunikasi Massa

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh McQuail komunikasi massa merupakan suatu proses yang melibatkan penggunaan media oleh komunikator untuk menyebarkan pesan secara luas dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah menghasilkan makna-makna yang diharapkan mampu mempengaruhi audiens yang jumlahnya besar dan beragam dengan berbagai strategi komunikasi yang berbeda. Proses ini memperlihatkan peran penting media massa dalam membentuk persepsi dan pengetahuan masyarakat, serta mempengaruhi perilaku dan opini publik. Oleh karena itu, penelitian tentang komunikasi massa menjadi relevan untuk memahami dinamika interaksi antara media, komunikator, dan audiens dalam konteks yang terus berkembang (Halik, 2013).

Banyak definisi komunikasi massa yang telah disampaikan oleh para ahli komunikasi, namun dari banyaknya definisi media massa semua definisi tersebut memiliki kesinambungan. Pada dasarnya, komunikasi massa merupakan proses penyebaran pesan melalui media massa yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi modern. Media massa berfungsi sebagai saluran utama dalam komunikasi ini, memungkinkan informasi dan pesan menjangkau audiens yang sangat luas secara efektif. Saluran-saluran tersebut meliputi berbagai platform seperti koran, majalah, radio, televisi, hingga internet, yang semuanya mempunyai peran penting dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat (Halik, 2013).

Menurut Nurudin (2013) media massa tidak hanya menjadi alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi medium yang mempengaruhi pola pikir masyarakat. Dalam konteks ini, media massa berperan sebagai penjaga

gerbang informasi (*gatekeeper*) yang menentukan apa yang layak dan tidak layak diketahui oleh khalayak, sehingga secara langsung maupun tidak langsung membentuk pandangan masyarakat terhadap berbagai isu. Selain menyampaikan informasi, media massa memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi sikap serta perilaku masyarakat. Perannya dalam proses demokrasi sangatlah penting, terutama dalam menyediakan ruang bagi pertukaran ide, kritik terhadap kebijakan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Media massa juga menjadi katalis dalam pembentukan budaya, baik melalui penyebaran nilai-nilai tradisional maupun adaptasi terhadap budaya global. Dengan kekuatannya yang besar, media massa sering menjadi alat yang digunakan untuk membangun narasi tertentu, baik untuk tujuan edukasi, hiburan, maupun propaganda. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peran dan fungsi media massa menjadi hal yang krusial dalam masyarakat modern, karena media tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas (Nurudin, 2013).

Media massa menjadi unsur khas yang membedakan komunikasi massa dari bentuk komunikasi lainnya. Penerima pesan dalam komunikasi massa tidak selalu berada pada posisi atau lokasi yang sama, sehingga komunikasi massa dapat diakses dari berbagai tempat, bahkan yang berjauhan. Meskipun demikian, untuk memastikan efektivitas komunikasi massa, penting bagi komunikator dan penerima pesan untuk memiliki kesamaan tujuan komunikasi, sehingga komunikasi yang berlangsung dapat berjalan dengan baik. Komunikasi massa ditujukan kepada khalayak umum secara terbuka dan disebarluaskan melalui media massa yang digunakan, memungkinkan pesan-pesan tersebut diterima dengan cepat dan secara simultan oleh masyarakat luas. Namun, ada perbedaan dalam penerimaan pesan jika media komunikasi mengalami hambatan teknis, seperti pemadaman listrik, kehabisan daya baterai, atau kehilangan sinyal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dinamika komunikasi massa serta cara mengatasi kendala teknis tersebut menjadi hal yang penting dalam penelitian komunikasi (Nurudin, 2013).

2.2.1. Elemen Komunikasi Massa

Elemen komunikasi yang berlaku dalam konteks umum juga diterapkan dalam komunikasi massa. Secara umum, proses komunikasi melibatkan seorang komunikator yang mengirimkan pesan melalui saluran kepada komunikan atau penerima pesan. Perbedaan utama antara komunikasi massa dan komunikasi interpersonal terletak pada jumlah pesan yang disampaikan kepada penerima, yang jauh lebih besar dalam komunikasi massa. Dalam komunikasi massa, pengirim pesan sering disebut sebagai sumber atau komunikator, sementara penerima pesan yang jumlahnya banyak dikenal sebagai audiens atau komunikan (Sitti Rahmah Marsidi, 2019). Saluran komunikasi massa meliputi berbagai media seperti televisi, radio, surat kabar, film, internet, dan lainnya. Melalui saluran-saluran ini, pesan dapat menjangkau audiens secara cepat dan luas, mempengaruhi persepsi serta sikap mereka terhadap berbagai isu dan fenomena sosial. Perbedaan mendasar antara komunikasi massa dan komunikasi interpersonal terletak pada sifat interaksi dan umpan balik yang terjadi.

Dalam komunikasi interpersonal, interaksi berlangsung secara langsung dan personal, memungkinkan umpan balik segera dan dialog dua arah. Sebaliknya, komunikasi massa cenderung bersifat satu arah, di mana umpan balik dari audiens tidak terjadi secara langsung dan seringkali tertunda. Hal ini menyebabkan komunikator dalam komunikasi massa harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti keragaman audiens dan potensi interpretasi pesan yang berbeda-beda, untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami sesuai dengan tujuan. Selain itu, media massa memiliki kemampuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan heterogen dibandingkan dengan komunikasi interpersonal, sehingga pesan yang disampaikan harus dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman latar belakang dan kebutuhan informasi dari audiens tersebut (Nur'aini Fazrin, 2024).

Terdapat beberapa elemen komunikasi massa antara lain:

1. Komunikator

Komunikator melibatkan jaringan yang luas dimana stasiun lokal tersebar, serta melibatkan juga para direktur dan staf teknis yang termasuk dalam produksi suatu acara televisi. Maka dari itu, dalam ini, konsep komunikator masuk dalam kolaborasi berbagai individu yang bergabung dalam suatu lembaga media massa. Pada setiap individu nya memiliki peran khusus dalam menyampaikan sebuah pesan kepada audiens, baik dalam proses produksi, penyiaran, maupun pelaksanaan tugas teknis lainnya. Mereka bekerja sama untuk mewujudkan dan menyampaikan konten yang relevan dan menarik bagi para audiens, sehingga mencerminkan dinamika dan keberagaman dari proses komunikasi massa (Permatasyari, 2021).

2. Isi

Menurut Ray Eldon Hiebert dan rekan-rekannya (1985), konten media dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori utama, yaitu: berita dan informasi, analisis serta penafsiran, pendidikan dan sosialisasi, hubungan masyarakat serta upaya persuasif, iklan serta berbagai bentuk penjualan lainnya, dan hiburan. Penggolongan ini membantu untuk memahami berbagai jenis konten yang disajikan oleh media massa, mulai dari penyampaian informasi hingga upaya persuasif dalam mempengaruhi opini publik, serta memperkaya pemahaman masyarakat dalam berbagai bidang, tidak terkecuali hiburan yang menjadi bagian penting dalam ekosistem media (Puspita, 2017).

3. Audiens

Audiens memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi massa. Audiens merupakan kelompok yang beragam, terdiri dari individu-individu dengan latar belakang yang

berbeda-beda, seperti penonton televisi, pembaca buku, majalah, koran, atau jurnal ilmiah. Oleh karena itu, setiap individu memiliki karakteristik yang unik (McQuail, 1998).

4. Feedback

Terdapat dua umpan balik (*feedback*) yaitu umpan balik langsung (*immediate feedback*) dan umpan balik tidak langsung (*delayed feedback*). Umpan balik langsung terjadi secara instan atau langsung. Ketika komunikator dan komunikan melakukan interaksi secara langsung. Hal ini dapat terjadi dalam berkomunikasi secara langsung maupun secara online. Sedangkan umpan balik tidak langsung, memerlukan proses yang lebih panjang karena tidak terjadi komunikasi secara langsung, tetapi umpan balik tersebut berbentuk tulisan atau melalui media lalu setelah itu interaksi akan berlangsung (Witta Perdana Putri, 2024).

5. Gangguan

Dalam konteks komunikasi massa, gangguan menjadi faktor yang dapat menghambat proses penyampaian pesan secara efektif. Dua tipe gangguan utama yang sering terjadi adalah gangguan saluran dan gangguan semantik. Yaitu gangguan saluran dan gangguan sistematis. Gangguan saluran yaitu gangguan muncul dalam penyampaian pesan melalui media massa. Hal ini mencakup banyak hal seperti, kesalahan cetak, gelombang yang tidak jelas dalam saluran televisi, gangguan sinyal internet dan gangguan kualitas suara atau video. Gangguan semantik mengarah pada gangguan kesalahan dalam menerima pemaknaan dan pengertian pesan yang disampaikan. Gangguan semantik terjadi ketika terdapat kebingungan atau ketidaksesuaian makna antara pengirim pesan dan penerima pesan. Ini terjadi karena kurangnya pemahaman bahasa, perbedaan

interpretasi, atau ketidakjelasan penyampaian pesan (Winda Kustiawan, KOMUNIKASI MASSA, 2022).

6. Gatekeeper

Menurut Jhon R. Bittner (1996), konsep gatekeeper merujuk pada kelompok individu yang memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengatur aliran informasi dalam saluran komunikasi massa. Para gatekeeper ini, seperti wartawan, editor berita, atau editor film, memiliki kekuasaan untuk memilih informasi mana yang akan disampaikan kepada publik (Oknita, 2022).

7. Pengatur

Pengatur dalam komunikasi massa lebih kepada subjek yang secara tidak langsung mengambil bagian dalam menggerakkan arus pesan pada media massa, Subjek ini memiliki berbagai pihak seperti, pengadilan, pemerintah, konsumen, organisasi profesional, dan kelompok penekan, termasuk narasumber dan pengiklan, memiliki peran sebagai pengatur. Fungsi utama pengatur ini muncul karena mereka dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan redaksional yang diterapkan (Ido Prijana Hadi, 2021).

8. Filter

Filter adalah konsepsi bagi landasan yaitu bagaimana audiens menerima pesan pesan yang sudah disampaikan. Filter dapat digambarkan seperti sebuah bingkai kacamata yang dapat dilihat audiens untuk melihat dunia dan sekitarnya. Maksud dari perumpamaan tersebut adalah pandangan terhadap dunia nyata yang disimpan dalam ingatan yang dipengaruhi oleh kerangka tersebut. Filter dapat berupa fisik, psikologis, budaya dan informasi yang diterima (Nurudin, 2013).

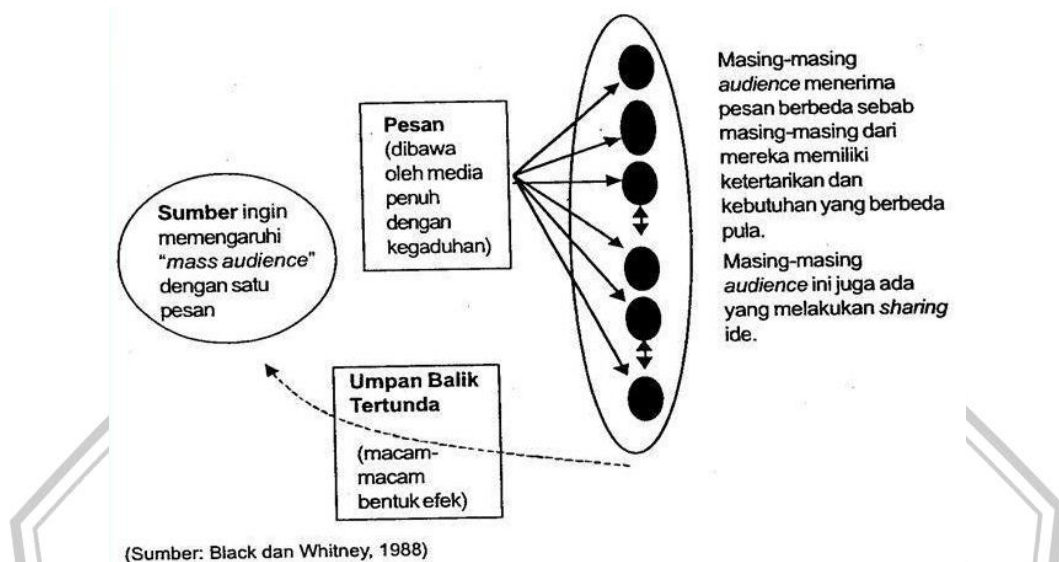
2.2.2. Model Komunikasi Massa

Komunikasi massa merupakan kerangka yang unik dalam mengalirkan pesan-pesan yang disampaikan. Untuk menyediakan pemahaman yang kokoh terhadap model-model Komunikasi Massa, maka terdapat empat elemen yang dijadikan landasan dalam pembuatan model-model tersebut (Sukmawati Abdullah, 2024). Empat elemen tersebut ialah, Pertama audiens dalam komunikasi massa mencakup sejumlah besar individu yang dapat berkembang dengan cepat setiap saat. Maka ini dinyatakan dalam bentuk proses komunikasi yang disampaikan oleh Gerhart D. Wiebe dalam Intrapersonal menuju interpersonal group mass. Kedua pesan dalam tahapan kedua ini menjadi lebih personal, terspesialisasi, dan juga bersifat umum. Ini dapat terjadi karena penerimaan pesan berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang jumlahnya cukup besar. Yang ketiga setiap audiens baik secara fisik maupun emosional, terpisah oleh ruang dan waktu dari komunikator dalam komunikasi massa. Keempat yaitu media massa menjadi syarat esensial dalam mengatur saluran komunikasi massa, menjadi landasan yang tak terpisahkan dari kemajuan komunikasi modern (Annisa Eka Syafrina, 2022).

Maka karena itu, dalam membedakan komunikasi massa dengan bentuk komunikasi lainnya ialah, pengetahuan akan proses terjadinya komunikasi massa sangatlah penting. Pentingnya mempersembahkan model komunikasi secara keseluruhan terlebih dahulu adalah agar kita dapat membedakan dan membandingkan model komunikasi secara umum dengan model komunikasi massa, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai esensi dan karakteristik komunikasi massa. Model komunikasi massa yang dikemukakan oleh Black dan Whitney membagi proses komunikasi menjadi empat komponen utama, yaitu sumber, pesan, umpan balik, dan audiens. Meskipun setiap komponen memiliki ciri khas yang berbeda, namun terdapat ciri umum

yang melekat pada komunikasi massa secara keseluruhan (Winda Kustiawan, 2022).

Gambar 1.1 Model Komunikasi Black and Whitney



Sumber: (Nurudin, 2013)

Model ini tidak mengakui peran gatekeeper sebagai filter atau penghalang informasi, berbeda dengan model-model lain yang menekankan pentingnya gatekeeper dalam proses komunikasi massa. Dalam model ini, sumber yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi audiens (sebagai penerima pesan) turut diperhitungkan, bersama dengan pesan yang mungkin mengalami gangguan atau distorsi karena disampaikan melalui saluran media massa. Audiens memiliki beragam minat dan kepentingan dalam menafsirkan pesan yang disampaikan melalui media massa, sementara umpan balik yang diterima cenderung tertunda dan menghasilkan efek yang beragam akibat respon audiens yang berbeda-beda terhadap pesan tersebut (Nurudin, 2013).

2.2.3. Efek Komunikasi Massa

Menurut Keith R. Stamm dan John E. Bowes, efek komunikasi massa merujuk pada perubahan perilaku manusia yang terjadi setelah

individu terpapar oleh pesan dari media massa (Muhamad Bisri Mustofa A. S., 2022). Efek komunikasi massa ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Efek Primer

Efek primer mencakup terpaan, perhatian, dan pemahaman yang berkaitan dengan media massa yang disampaikan, serta pengaruh dari terpaan media massa terhadap audiens. Hal ini juga mencakup kondisi di mana masyarakat berdiskusi mengenai program televisi yang sedang ditayangkan (Muhamad Bisri Mustofa A. S., 2022).

2. Efek Sekunder

Efek sekunder mencakup perubahan kognitif serta perubahan dalam perilaku. Penjelasan lebih lanjut menunjukkan bahwa efek ini menggambarkan realitas konkret yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu bentuk efek sekunder adalah *uses and gratification*, yang berfokus pada pengukuran tingkat kegunaan dan kepuasan audiens dalam menggunakan media massa. Fokus utama dari efek ini adalah untuk memahami bagaimana media mempengaruhi audiens, di mana audiens menerima pesan-pesan yang disampaikan melalui media (Nurudin, 2013).

Efek komunikasi massa menerapkan keberadaannya menjadi tiga bagian yaitu, efek kognitif (pengetahuan, efektif, emosional, perasaan) dan behavioral (tingkah laku). Ketiga bagian efek komunikasi tersebut tidak bisa berjalan sendiri melainkan saling mendorong satu sama lain agar dapat mempengaruhi pesan. Faktor tersebut dibagi menjadi dua yaitu faktor individu dan faktor sosial (Nurudin, 2013).

1. Efek Individu

Menurut Nurudin (2013), faktor individu memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pesan, karena dipengaruhi oleh aspek psikologis. Dalam perspektif psikologi, karakteristik pribadi seseorang turut mempengaruhi proses efek yang terjadi. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain adalah perhatian selektif, persepsi selektif, retensi selektif, motivasi, pengetahuan, kepercayaan, pendapat, nilai, kepribadian, serta kemampuan untuk beradaptasi (Nurudin, 2013).

2. *Faktor Sosial*

Menurut Nurudin (2013), seorang sosiolog fokus pada kajian masyarakat dari berbagai perspektif dengan melihat individu sebagai bagian dari gejala sosial, yang berarti individu dilihat dalam konteks hubungannya dengan orang lain dalam cakupan yang lebih luas. Semua aspek ini dipengaruhi oleh efek yang terjadi. Faktor individu ini kemudian berkembang menjadi faktor sosial yang kompleks, karena batasannya yang sangat tipis. Meskipun demikian, hal ini bukan berarti tidak dapat dibedakan, baik antara individu dengan individu lainnya maupun antara individu dengan masyarakat (Nurudin, 2013).

2.3. **Film**

Film merupakan salah satu bentuk media massa yang sangat populer dan diminati oleh masyarakat. Sebagai sarana komunikasi massa, film memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh sutradara melalui narasi yang ditampilkan. Pesan tersebut disampaikan dalam bentuk cerita dalam film, sehingga penonton dapat memahami pesan yang ingin disampaikan. Film memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan pesan yang terkandung di dalamnya. Cerita yang disajikan dalam film dikemas dengan cara yang menarik dan efektif agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh penonton. Pesan atau nilai-nilai yang ada dalam film tersebut dapat mempengaruhi penonton dalam aspek kognitif, afektif, maupun konatif. Film juga

dapat merekam realitas yang berkembang dalam masyarakat dan memroyeksikannya ke dalam bentuk visual di layar (Gusniati, 2024).

Film tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan semata, tetapi juga memiliki peran penting sebagai alat komunikasi yang efektif untuk menyampaikan berbagai pesan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, kalangan remaja menjadi salah satu target utama karena mereka merupakan kelompok yang paling banyak mengonsumsi konten film. Dengan memanfaatkan kombinasi elemen audio dan visual, film mampu menarik perhatian penonton secara emosional maupun intelektual. Efek sinematik yang dihadirkan, seperti gambar yang menarik dan alur cerita yang kuat, membuat film menjadi salah satu media yang paling diminati dalam menyampaikan pesan kepada khalayak luas. Sebagai sarana komunikasi massa, film juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan yang bersifat edukatif, informatif, dan persuasif. Pesan edukatif dalam film dapat berupa nilai-nilai moral, ajakan untuk melakukan perubahan sosial, atau pembelajaran tentang isu-isu global yang relevan. Sementara itu, pesan informatif seringkali disampaikan melalui film dokumenter atau film berbasis sejarah yang memberikan wawasan baru kepada penonton (Aldo Syahrul Huda, 2023).

Di sisi lain, pesan persuasif digunakan dalam berbagai genre film untuk mempengaruhi opini, sikap, atau perilaku masyarakat terhadap suatu isu tertentu. Dengan pendekatan yang kreatif dan menarik, film dapat menyentuh hati dan pikiran penontonnya, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan diingat. Berbagai karakteristik yang dimiliki film, seperti kemampuannya untuk menghibur, mendidik, dan menginspirasi, menjadikannya media yang relevan untuk semua kalangan, baik tua maupun muda. Bagi remaja, film sering menjadi medium untuk mengeksplorasi ide-ide baru, memahami dinamika sosial, dan bahkan menemukan jati diri mereka. Di sisi lain, film juga dapat menjadi refleksi kehidupan masyarakat yang diangkat ke layar lebar, sehingga memberikan gambaran nyata tentang masalah-masalah sosial yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat film untuk menyadari tanggung jawab mereka dalam menciptakan karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa

dampak positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi penonton setia film-film mereka (Aldo Syahrul Huda, 2023).

Film merupakan salah satu bentuk media massa yang paling populer di dunia. Film memiliki kemampuan untuk menggabungkan elemen visual, audio, dan naratif untuk menyampaikan cerita kepada penonton. Film dianggap sebagai salah satu bentuk seni yang paling kuat dan berpengaruh dalam budaya populer. Film dalam media massa memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat. Mereka tidak hanya hiburan belaka, tetapi juga merupakan alat untuk menyampaikan pesan, mempengaruhi opini publik, dan merefleksikan isu-isu sosial yang ada dalam masyarakat. Film juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pandangan dan sikap penonton terhadap topik tertentu. Dalam konteks media massa, film seringkali menjadi objek perhatian yang signifikan. Mereka dipromosikan melalui berbagai saluran media seperti televisi, radio, iklan cetak, media sosial, dan situs web. Ulasan film dan wawancara dengan para pemain dan pembuat film juga ditemukan dalam berbagai media massa (Aldo Syahrul Huda, 2023).

Media massa juga berperan dalam melaporkan berita tentang film, termasuk kabar tentang perilisian, ulasan, prestasi, dan kontroversi yang terkait dengan produksi film. Majalah dan surat kabar sering memiliki bagian khusus yang didedikasikan untuk film, di mana kritikus film memberikan ulasan mereka dan memberikan panduan bagi penonton potensial. Selain itu, media massa juga berperan penting dalam mempromosikan film melalui wawancara dengan para pemain dan pembuat film, liputan dari acara perdana, dan peliputan dari lokasi syuting. Ini membantu menciptakan buzz dan keingintahuan di antara penonton, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keberhasilan finansial suatu film (Asri, 2020). Namun, perlu diingat bahwa film dalam media massa juga dapat menghadapi kritik. Beberapa film dikritik karena konten mereka yang dianggap tidak pantas atau kontroversial, sementara yang lain dikritik karena penggambaran yang tidak akurat atau stereotip terhadap kelompok tertentu. Kritikus film juga sering memberikan pandangan kritis tentang aspek-aspek teknis dan artistik dari suatu film. Secara keseluruhan, film dalam media massa memiliki peran yang signifikan dalam

menyampaikan pesan, mempengaruhi opini publik, dan merefleksikan isu-isu sosial. Mereka juga menjadi sumber hiburan yang penting bagi masyarakat dan memainkan peran penting dalam budaya populer (Gani, 2019).

Dalam film terdapat beberapa kategori genre yang memiliki arti sebagai klasifikasi jenis film. Beragam jenis film di dunia perfilman seperti, thriller, horor, romance, action, komedi, drama, coming age story dan masih banyak lagi jenis jenis film. Jenis jenis film tersebut sudah memasuki box office karena diminati banyak masyarakat dan juga sudah tersebar di belahan dunia. Genre film merupakan bentuk yang ditonjolkan dalam sebuah film. Seperti romance menonjolkan unsur cinta, komedi menonjolkan unsur lucu, dokumenter menonjolkan bagaimana kegiatan atau peristiwa dalam film secara natural. Masih genre yang memiliki karakteristik tersendiri (Irawa, 2023).

Dalam penelitian, peneliti meneliti Serial Anne with E. Dimana Serial itu sendiri adalah film yang memiliki dua genre sekaligus. Berikut kategorisasi genre Serial Anne with E:

1. Film Drama

Film drama banyak menggambarkan peristiwa kehidupan yang dramatis. Dalam film drama lebih banyak menyoroti konflik antar pemeran, memperlihatkan perubahan dan perkembangan emosional yang dialami oleh pemeran film. Genre drama berfokus pada aspek kehidupan manusia, menggali emosi hubungan antara peran, konflik konflik pribadi dan konflik sosial. Film drama memiliki banyak tema seperti, percintaan, keluarga, perjuangan hidup, konflik sosial, perang dan masih banyak lagi. Pemeran dalam film drama seringkali dihadapkan dengan perjalanan hidup yang sulit, pilihan yang sulit, atau adanya konflik batin. Tujuan adanya film drama untuk membangun dan menggugah emosi para penonton dengan setiap adegan yang disajikan. Film drama dapat menyentuh perasaan penonton, menginspirasi, mengajarkan pelajaran hidup, atau memprovokasi penonton terhadap suatu isu (Pramudya Shaka Nugraha, 2024).

2. Film Coming of Age Story

Film coming of age story merupakan film yang menggambarkan perjalanan emosional dan perkembangan pemeran utama muda yang menghadapi perubahan signifikan dalam hidupnya. Dalam film ber genre coming of age story pemeran utama akan menyelesaikan masalah internal dan eksternal yang dialaminya sehingga membentuk identitas dan pandangan mengenai dunia. Genre film coming of age story berfokus pada perjalanan hidup mencari jati diri, pertumbuhan pribadi dan penemuan diri. Para pemeran muda sering menghadapi permasalahan seperti persahabatan, cinta, keluarga, identitas seksual, kecemasan, ketidakpastian masa depan, dan tantangan lainnya ketika akan menuju dewasa. Tujuan adanya genre film coming of age story adalah untuk membangun dan menggugah emosi para penonton dengan setiap adegan yang disajikan selain itu penonton juga akan mengikuti perkembangan dan isu-isu yang diangkat oleh genre film coming of age (Berghahn, 2010).

2.3.1. Film Sebagai Media Komunikasi Massa

Film adalah salah satu bentuk komunikasi massa yang berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan, seperti pesan budaya, moral, dan tradisi. Secara umum, komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik itu media cetak maupun elektronik. Pada tahap awal perkembangan komunikasi massa, istilah ini berasal dari pengembangan kata *media of mass communication*, yang merujuk pada alat yang digunakan untuk mengalihkan pesan dari pengirim kepada penerima. Media dalam komunikasi massa bersifat terbuka, artinya dapat dilihat, dibaca, dan didengar oleh publik (Muhamad Bisri Mustofa S. W.-F., 2022).

Media ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak berfokus pada penyampaian pesan melalui elemen visual, yang terdiri dari lembaran berisi teks, gambar, dan foto yang dipadukan dengan tata warna serta halaman putih. Media cetak berfungsi

sebagai dokumentasi dari kata-kata atau peristiwa yang terjadi, yang kemudian diubah oleh jurnalis menjadi bentuk tulisan, foto, dan sebagainya. Media massa cetak mencakup surat kabar, majalah, dan buku. Di sisi lain, media elektronik adalah sarana komunikasi yang memanfaatkan alat elektronik modern untuk menarik perhatian audiens secara penuh. Media ini memiliki sifat demokratis dengan jangkauan audiens yang luas, tidak terbatas pada kalangan tertentu saja. Media massa elektronik meliputi radio, televisi, film, dan internet (Iqbal, Kredibilitas Media Cetak dan Media Online , 2022).

Menurut Effendy (1986), film merupakan media komunikasi audio-visual yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada individu atau kelompok yang berada di suatu tempat tertentu. Pesan yang disampaikan melalui film sebagai media komunikasi massa dapat berbentuk beragam, tergantung pada tujuan atau misi film tersebut. Secara umum, film mampu menyampaikan berbagai pesan, termasuk pesan pendidikan, hiburan, informasi, dan sosialisasi. Albert Bandura dalam teori Social Learning menyatakan bahwa media massa, termasuk film, berperan sebagai agen sosialisasi utama selain keluarga, guru, dan teman. Dengan demikian, film dapat dilihat sebagai sarana komunikasi massa yang efektif untuk sosialisasi. Film memiliki kemampuan untuk dengan cepat menarik perhatian audiens berkat sifat audio-visualnya, yang memungkinkan untuk menyampaikan banyak informasi dan pesan dalam waktu yang singkat. Saat menonton film, audiens dapat merasakan pengalaman yang melampaui ruang dan waktu, yang memungkinkan penyampaian cerita atau isu yang dapat mempengaruhi audiens (Effendy, 1986).

Menurut Severin J. Werner dan Tankard James W. Jr dalam buku mereka, komunikasi dapat dianalisis melalui berbagai komponen keterampilan. Secara lebih spesifik, film sebagai media massa memiliki peran dalam aspek pendidikan, pengembangan budaya, hiburan, dan

ekonomi. Berdasarkan keempat komponen ini, dapat dijelaskan bahwa film berfungsi sebagai media yang mengedepankan nilai-nilai keberagaman budaya kepada masyarakat internasional. Fungsi pendidikan film terletak pada kemampuannya untuk mendidik audiens melalui pesan-pesan yang disampaikan. Selain itu, film juga berperan dalam memperkuat dan mengembangkan nilai-nilai budaya melalui simbol-simbol yang terkandung dalam cerita. Film juga berfungsi sebagai sarana hiburan bagi penontonnya. Dalam konteks ekonomi, film dapat menjadi sektor industri yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat (Werner Joseph Severin, 1988).

Film, sebagai bentuk seni yang memiliki pengaruh luar biasa, tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga mampu memperluas pengalaman hidup individu. Melalui elemen visual dan naratifnya, film dapat membawa penonton menjelajahi dimensi kehidupan yang lebih dalam, menghadirkan perspektif baru, dan memperkaya cara pandang seseorang terhadap dunia. Dalam setiap adegan dan alur cerita yang disajikan, film seringkali menyentuh isu-isu yang relevan dengan kehidupan manusia, seperti konflik sosial, perjuangan personal, hingga refleksi budaya. Oleh karena itu, film tidak hanya sekedar tontonan, tapi juga medium yang dapat menginspirasi dan memberikan pelajaran berharga kepada audiensnya. Sebagai sarana seni, film juga menciptakan ruang dialog yang memungkinkan masyarakat untuk merenungkan realitas yang mereka hadapi dan menghubungkannya dengan pengalaman personal. Namun, perlu disadari bahwa film tidak sepenuhnya bebas dari risiko dampak negatif (Sugiarto, 2020).

Sumarno menyebutkan bahwa meskipun film dapat menjadi agen pendidikan yang signifikan, ia juga berpotensi membawa pengaruh buruk jika tidak diawasi secara cermat. Film dengan konten yang tidak sesuai, seperti kekerasan, pornografi, atau stereotip yang merugikan, dapat memberikan dampak buruk terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat,

terutama pada kelompok usia yang rentan seperti anak-anak dan remaja. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat film, regulator, dan penonton untuk memiliki kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam memastikan bahwa film yang diproduksi dan ditonton dapat memberikan dampak positif bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Pengawasan, edukasi, dan pemahaman yang tepat terhadap konten film menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi film sebagai medium yang memperkaya kehidupan, sekaligus meminimalkan dampak buruk yang mungkin timbul (Kurniawan, 2021).

2.3.2. Fungsi Komunikasi Massa Berbasis Perfilman

Menurut Ron Mottam terdapat tiga aspek penting dalam fungsi film, yakni aspek artistik, industri, dan komunikatif. Dalam konteks seni (art), sebagian besar film memiliki tujuan naratif yang mendalam. Ini berarti film menyajikan serangkaian peristiwa yang saling terkait secara kausal, yang secara kolektif membentuk sebuah cerita (Shelvencia Thenata, 2020).

Selain itu McQuail dalam karyanya berjudul "Teori Komunikasi Massa" (McQuail, 1998), film dianggap sebagai salah satu media komunikasi massa yang memegang peran penting dalam masyarakat. Film memiliki beberapa fungsi dan peran yang beragam:

1. Film berperan sebagai sumber informasi yang menyampaikan pengetahuan mengenai peristiwa-peristiwa dan kondisi masyarakat dari berbagai penjuru dunia.
2. Film berfungsi sebagai media sosialisasi yang efektif dalam menyampaikan nilai-nilai, norma, dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa selain sebagai hiburan, film juga memiliki potensi untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada audiensnya secara tidak langsung.
3. Film seringkali berfungsi sebagai sarana pengembangan kebudayaan, tidak hanya dalam konteks pengembangan seni dan

simbol, tetapi juga dalam hal pengemasan berbagai aspek seperti tata cara, mode, gaya hidup, dan norma-norma yang berlaku.

2.4. Feminisme

Feminisme dapat dipahami sebagai sebuah gerakan sosial dan politik yang berupaya untuk mewujudkan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, serta mengkritik dan menentang ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Pendekatan dan pandangan terhadap feminisme dapat bervariasi di antara para ahli, tetapi secara umum, feminisme bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang mengakui, menghormati dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Kesenjangan gender dan perbedaan latar belakang sosial berkontribusi pada dislokasi yang secara tidak langsung mencerminkan posisi perempuan yang berada pada status terendah, baik dalam kehidupan sosial maupun spiritual. Melalui tokoh-tokoh aktif dalam gerakan dan teori feminisme, diupayakan untuk memperjuangkan hak dan peran perempuan agar tidak dipandang lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam struktur sosial masyarakat secara keseluruhan. Gerakan feminisme bertujuan agar perempuan dapat bersaing secara setara dengan laki-laki di berbagai bidang, serta memperoleh hak dan kedudukan yang setara (Wibowo, 2022).

Gerakan feminisme berupaya untuk memperjuangkan dan melindungi perempuan dari berbagai permasalahan sosial, seperti rasisme, pelecehan, dan penindasan. Teori feminisme berusaha menganalisis kondisi-kondisi yang membentuk kehidupan perempuan serta menyelidiki pemahaman kultural mengenai makna menjadi seorang perempuan. Pada awalnya, teori feminisme dipengaruhi oleh tujuan politis gerakan perempuan, yakni kebutuhan untuk memahami subordinasi dan eksklusi atau marginalisasi perempuan dalam berbagai aspek kultural dan sosial (Stevi Jackson, 2009).

Menurut Najmah dan Khatimah Sai'dah dalam bukunya *Revisi Politik Perempuan*, feminisme adalah sebuah kesadaran terhadap penindasan dan eksploitasi yang dialami perempuan, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun dalam masyarakat. Baik laki-laki maupun perempuan, sadar atau tidak,

memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan secara leksikal. Feminisme merupakan gerakan yang memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Gerakan ini dapat berkembang seiring dengan pandangan-pandangan para feminis yang didasarkan pada realitas historis, budaya, serta tingkat kesadaran, opini, dan perilaku masyarakat (Shiddiqoh, 2022).

2.4.1. Sejarah Berkembangnya Feminisme

Sejarah perkembangan pemikiran feminisme memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik serta menantang paradigma tentang perdebatan gender yang menjadi akar ketidakadilan sosial. Berbagai teori feminisme seperti Liberal, Radikal, dan Marxis merumuskan argumen-argumen yang mengedepankan analisis gender yang mendalam, meliputi aspek-aspek sosiologis, ekonomi, dan politik. Teori-teori feminisme gelombang pertama, yang menitikberatkan pada isu-isu sosial, telah menggugat posisi dan peran perempuan dalam masyarakat, terutama dalam konteks hak-hak sipil mereka (Suwastini, 2013)

Istilah "feminisme" pertama kali diperkenalkan oleh aktivis sosialis utopis asal Prancis, Charles Fourier, pada tahun 1837. Konsep ini mulai mengemuka di Eropa sebagai bagian dari perjuangan untuk mengubah ketidaksetaraan gender yang ada pada masa itu. Fourier, yang dikenal dengan pemikirannya yang Radikal tentang peran perempuan dalam masyarakat, mengusulkan bahwa perempuan seharusnya memiliki hak dan kebebasan yang sama dengan laki-laki, khususnya dalam aspek sosial dan ekonomi. Meskipun awalnya terbatas pada lingkup intelektual, gagasan tersebut mulai mendapatkan perhatian lebih luas dan memicu diskusi-diskusi penting tentang posisi perempuan dalam masyarakat. Feminisme yang berkembang di Eropa ini kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan berkembang pesat seiring dengan diterbitkannya karya monumental John Stuart Mill pada tahun 1869 yang berjudul *The Subjection of Women* (Mill, 1869). Dalam karya ini, Mill mengemukakan argumen yang menegaskan bahwa subordinasi perempuan bukanlah suatu

hal yang alamiah, melainkan merupakan konstruksi sosial yang harus diubah. Dengan mendasarkan argumennya pada prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia, Mill mengajak masyarakat untuk meredefinisi peran dan posisi perempuan, serta memperjuangkan hak-hak sipil dan politik mereka.

Publikasi Mill menjadi salah satu tonggak penting yang menandai lahirnya feminisme Gelombang Pertama, sebuah gerakan yang fokus pada perjuangan untuk hak-hak dasar perempuan, termasuk hak pilih, hak atas pendidikan, dan hak untuk bekerja di luar rumah. Gerakan feminisme Gelombang Pertama ini tidak hanya mempengaruhi pemikiran sosial-politik pada masa itu, tetapi juga menginspirasi generasi-generasi berikutnya dalam perjuangan mereka untuk kesetaraan gender. Perjuangan yang dimulai pada abad ke-19 ini membuka jalan bagi gerakan feminisme yang lebih luas dan inklusif di abad-abad selanjutnya, yang melibatkan berbagai kelompok perempuan di seluruh dunia dalam upaya mencapai kesetaraan hak dan kesempatan di berbagai bidang kehidupan (Mill, 1869).

Gerakan feminisme, yang pada awalnya bertujuan untuk mengakhiri penindasan terhadap kebebasan perempuan, telah mengalami transformasi signifikan seiring berjalannya waktu. Secara historis, perempuan seringkali merasa dirugikan dan ditempatkan pada posisi subordinat. Dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, pekerjaan, pendidikan, dan politik, perempuan seringkali mengalami subordinasi oleh laki-laki, terutama dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki. Dalam konteks masyarakat tradisional agraris, laki-laki umumnya lebih dominan di ranah publik, sedangkan perempuan cenderung terbatas pada aktivitas di ranah domestik. Namun, perubahan signifikan mulai terjadi seiring dengan munculnya era Liberalisme di Eropa dan Revolusi Perancis pada abad ke-18, yang kemudian memberikan pengaruh besar hingga ke Amerika Serikat dan berbagai wilayah lain di dunia (Iqbal, 2022).

Fundamentalisme agama yang menindas perempuan juga memperburuk kondisi yang dihadapi perempuan. Dalam tradisi agama Kristen, terdapat praktik dan ajaran yang mendukung subordinasi perempuan, seperti penolakan terhadap perempuan sebagai pendeta dan pembatasan jabatan tertentu yang hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Perjuangan untuk meningkatkan kedudukan perempuan yang dimulai di Eropa kemudian diikuti oleh Amerika Serikat selama revolusi sosial dan politik. Pada tahun 1792, Mary Wollstonecraft menulis karya berjudul *Vindication of the Rights of Woman* yang memuat prinsip-prinsip dasar feminisme dan menjadi pijakan perjuangan feminis di masa berikutnya. Selama periode 1830-1840, bersamaan dengan gerakan penghapusan perbudakan, isu hak-hak perempuan mulai mendapatkan perhatian, termasuk perbaikan kondisi kerja dan upah, akses pendidikan, serta hak untuk memilih dalam pemilu (Mukhtar, 2010).

Menjelang abad ke-19, feminisme mulai berkembang menjadi sebuah gerakan yang mendapat perhatian besar dari perempuan kulit putih di Eropa. Perempuan dari negara-negara kolonial Eropa mengadvokasi konsep yang mereka sebut sebagai "persaudaraan universal perempuan" (*universal sisterhood*), yang berfokus pada pentingnya solidaritas dan persatuan di antara perempuan dari berbagai latar belakang dan budaya. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada isu-isu lokal, tetapi juga memperhatikan kondisi perempuan di seluruh dunia, termasuk di negara-negara jajahan. Perjuangan ini menjadi landasan bagi gerakan feminisme global yang terus berkembang hingga saat ini (Iqbal, 2022).

Pada tahun 1960-an, bermunculan negara-negara baru di dunia, sebuah era baru bagi gerakan feminisme dimulai, terutama dalam hal hak-hak politik perempuan. Salah satu pencapaian besar dari gelombang ini adalah diperolehnya hak pilih bagi perempuan, yang memungkinkan mereka untuk terlibat langsung dalam politik kenegaraan dan turut berpartisipasi dalam proses demokrasi, khususnya dalam pemilihan

parlemen. Gerakan feminisme pada periode ini, yang dikenal sebagai Gelombang Kedua, dipelopori oleh sejumlah intelektual perempuan, terutama dari Perancis. Tokoh-tokoh penting seperti Hélène Cixous, seorang Yahudi kelahiran Aljazair yang kemudian menetap di Perancis, dan Julia Kristeva, seorang perempuan asal Bulgaria yang juga menetap di Perancis, memainkan peran sentral dalam membentuk wacana feminisme intelektual pada masa itu. Cixous, dalam karya terkenalnya *The Laugh of the Medusa*, mengkritik dominasi logosentrisme, sebuah pendekatan pemikiran yang didominasi oleh nilai-nilai maskulin, dan menyerukan penciptaan ruang untuk suara perempuan dalam konstruksi pemikiran dan budaya (Waristo, 2022).

Pada periode yang sama, sejumlah feminis individualis dari dunia Barat, meskipun tidak semuanya, mulai mengalihkan perhatian mereka pada kondisi perempuan di negara-negara dunia ketiga, seperti Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Perjuangan feminis di negara-negara tersebut berfokus pada isu-isu hak-hak dasar perempuan, yang seringkali terabaikan dalam struktur sosial dan ekonomi (Waristo, 2022). Di Amerika Serikat, feminisme memperoleh momentum yang lebih besar dengan terbitnya buku *The Feminine Mystique* karya Betty Friedan pada tahun 1963 (Friedan, 1963). Buku tersebut berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketidakpuasan dan penindasan yang dialami perempuan, khususnya dalam konteks domestik dan sosial. Tidak hanya menulis, Friedan juga mengambil langkah konkret dengan mendirikan National Organization for Women (NOW) pada tahun 1966. Organisasi ini memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di berbagai sektor kehidupan, termasuk mendorong pengesahan Equal Pay Act pada tahun 1963, yang menjamin upah setara bagi perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang sama, serta Civil Rights Act tahun 1964, yang memperluas hak-hak sipil perempuan di berbagai bidang kehidupan (Munoz, 2021).

Memasuki tahun 1990-an, kritik feminisme berkembang lebih dalam dengan memasuki dunia sains, yang dianggap sebagai institusi yang sangat patriarkal. Marginalisasi peran perempuan dalam dunia sains dipandang sebagai dampak dari struktur patriarki yang melekat dalam institusi tersebut. Namun, kritik feminis terhadap sains tidak berhenti pada masalah ketidaksetaraan gender semata. Feminisme juga berani melangkah lebih jauh ke dalam epistemologi sains untuk mengungkap ideologi patriarki yang terkandung dalam cara-cara ilmiah dan pendekatan yang digunakan dalam sains modern (Waristo, 2022). Dalam pandangan ekofeminisme, sains modern dianggap sebagai representasi maskulinitas yang berfokus pada eksploitasi alam, yang dianggap sebagai entitas yang lemah dan pasif, mirip dengan pandangan terhadap perempuan dalam masyarakat patriarkal. Konsep ini menyoroti bahwa sains, dengan cara pandang dan praktek yang eksploitatif, berkontribusi pada kerusakan alam dan lingkungan. Tokoh-tokoh feminis seperti Hilary Rose, Evelyn Fox Keller, Sandra Harding, dan Donna Haraway kemudian menawarkan alternatif untuk mendekonstruksi ideologi sains yang patriarkal, dan mendorong terbentuknya genre sains yang lebih inklusif dan sensitif terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan ekologi (Iqbal, 2022).

Dalam ranah sosial, gerakan feminis menyoroti keterbatasan hak-hak perempuan. Tradisi menempatkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga dan keluarga mengakibatkan sebagian besar kehidupan mereka terbatas dalam lingkup domestik. Selain itu, akses perempuan terhadap pendidikan tinggi, jabatan-jabatan tertentu, dan profesi-profesi khusus juga terhambat. Keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial, tetapi juga pada kehidupan ekonomi perempuan, di mana sebagian besar lapangan kerja tertutup dan upah yang diterima biasanya lebih rendah (Permatasyari, 2021). Di bidang politik, kaum feminis melihat partisipasi politik sebagai jalan keluar untuk memperjuangkan tuntutan mereka yang tidak terpenuhi oleh pemerintah. Mereka meyakini bahwa kemajuan perempuan hanya mungkin tercapai jika perempuan

memiliki peran yang signifikan dalam pemerintahan, tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek yang berpengaruh. Pada gelombang kedua feminisme, fokus perhatian bukan hanya terpaku pada pergerakan politik seperti pada gelombang pertama, melainkan lebih kepada analisis tentang konstruksi gender itu sendiri. Teori-teori feminisme gelombang kedua menyoroti secara kritis tentang bagaimana perbedaan gender telah dijelaskan sebagai "kodratiah" yang mengakar dalam masyarakat (Suwastini, 2013). Sementara gerakan feminisme gelombang ketiga masih dalam proses pembentukan identitasnya, debat-debat yang terus berlangsung menunjukkan bahwa feminisme tetap relevan dan perempuan memiliki kapasitas untuk mengambil tindakan tidak hanya secara personal tetapi juga politisi.

Perkembangan gerakan feminisme telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejalan dengan munculnya aliran-aliran kritis. Salah satu aspek penting dalam perkembangan feminisme adalah dalam konteks genre pemikiran, terutama dalam aliran hukum feminis (*feminist law*). Berbagai subdisiplin dalam hukum feminis menunjukkan keberagaman pandangan dan pendekatan dalam memperjuangkan kesetaraan gender serta mengkritisi struktur kekuasaan yang mempengaruhi perempuan dalam konteks hukum (Irawa, 2023). Perkembangan ini mencerminkan upaya yang berkelanjutan dalam mengubah paradigma hukum yang tidak selalu memperhatikan kebutuhan dan hak-hak perempuan secara adil. Berikut ini adalah evolusi gerakan feminisme dalam berbagai aliran pemikiran yang signifikan, terutama dalam konteks aliran hukum feminis (*feminist law*):

2.4.1.1. Feminisme Liberal

Feminisme Liberal adalah aliran yang berfokus pada penekanan kebebasan individu perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Pandangan utama dari feminisme ini adalah bahwa

perempuan harus memiliki kebebasan penuh, yang sejalan dengan prinsip kesetaraan dan rasionalitas yaitu, kesetaraan dalam berpendidikan, bersosial, berpendapat dan berpolitik. Kesetaraan dalam berpendidikan yaitu setiap individu laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang setara. Kesetaraan dalam bersosial menekankan bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama dalam kehidupan bersosial. Kesetaraan dalam berpendapat yaitu perempuan memiliki kesempatan untuk mengkritik normal sosial, menyuarakan pendapat dan partisipasi dalam diskusi public (Azizah, 2021). Kesetaraan dalam berpolitik yaitu kesetaraan dalam berpartisipasi politik menekankan bahwa perempuan harus memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek politik. Menurut pandangan ini, setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kapasitas yang sama untuk berpikir dan bertindak secara rasional. Oleh karena itu, ketertindasan dan keterbelakangan perempuan dianggap sebagai akibat dari kesalahan perempuan itu sendiri, yang belum mempersiapkan diri untuk bersaing dalam dunia yang didominasi oleh “persaingan bebas”. Feminisme Liberal menganggap bahwa perempuan perlu diberdayakan agar dapat bersaing dengan laki-laki dan memperoleh kedudukan yang setara, baik dalam ranah sosial, ekonomi, maupun politik (Yoga Rohtama, 2018).

Dalam pandangan feminisme Liberal, negara berperan sebagai penguasa yang tidak memihak dan bertindak berdasarkan prinsip pluralisme, yang mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok. Meskipun diakui bahwa negara cenderung didominasi oleh kepentingan kelompok pria yang menciptakan struktur kekuasaan yang berorientasi pada nilai-nilai maskulin, feminisme Liberal percaya bahwa negara seharusnya berfungsi untuk mendukung kesetaraan bagi semua kelompok.

Meskipun perempuan seringkali hanya dianggap sebagai warga negara tanpa keterlibatan langsung dalam pembuatan kebijakan, feminisme Liberal memandang bahwa perempuan seharusnya diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik, termasuk dalam pembuatan kebijakan di negara (Retnani, 2017). Tokoh-tokoh terkemuka dalam aliran ini, seperti Naomi Wolf, mengusung konsep "Feminisme Kekuatan," yang berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan ekonomi. Mereka menganggap bahwa perempuan kini telah memperoleh kekuatan melalui pendidikan dan pendapatan, dan harus terus menuntut hak-hak yang setara, serta kebebasan untuk membuat pilihan tanpa ketergantungan pada laki-laki.

Feminisme Liberal juga menyoroti ketidaksetaraan yang dialami perempuan, terutama dalam sektor domestik. Mereka mengkampanyekan bahwa pekerjaan yang dilakukan perempuan di rumah tangga tidak boleh dianggap sebagai pekerjaan yang tidak produktif, dan bahwa perempuan tidak boleh ditempatkan dalam posisi subordinat. Dalam konteks masyarakat Amerika yang materialistis dan individualistis, feminisme Liberal mendukung kebebasan perempuan untuk mengejar karir dan melepaskan diri dari ketergantungan pada pria. Akar teori ini berlandaskan pada keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk rasional dengan kemampuan yang setara dengan laki-laki, sehingga mereka berhak mendapatkan hak yang sama, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak sipil. Meskipun ada kemajuan dalam hal kesetaraan gender, masalah kebijakan negara yang masih bias gender menjadi tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, sejak abad ke-18, perempuan mulai menuntut pendidikan yang setara dengan laki-laki, dan pada abad ke-19, mereka berjuang untuk hak-hak sipil dan ekonomi yang setara. Di abad ke-20, organisasi-organisasi

perempuan mulai terbentuk untuk melawan diskriminasi di bidang politik, sosial, ekonomi, dan personal. Dalam konteks Indonesia, perjuangan feminisme Liberal dapat dilihat dalam reformasi hukum yang memperjuangkan keadilan melalui kebijakan kuota 30% bagi perempuan di parlemen, sebagai upaya untuk memastikan partisipasi aktif perempuan dalam pembuatan keputusan politik (Kasim, 2023).

2.4.1.2. Feminisme Radikal

Gerakan feminisme Radikal mulai berkembang sejak pertengahan tahun 1970-an, yang ditandai dengan munculnya ideologi “perjuangan separatisme perempuan.” Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap budaya seksisme dan dominasi sosial yang berbasis jenis kelamin, terutama di negara-negara Barat pada dekade 1960-an. Feminisme Radikal menentang berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan, seperti kekerasan seksual, eksploitasi dalam industri pornografi, dan sistem patriarki yang menganggap perempuan sebagai objek yang dapat diperlakukan semena-mena oleh laki-laki. Dalam kerangka ini, feminis Radikal menyatakan bahwa penindasan terhadap perempuan merupakan realitas yang tak terpisahkan dari struktur sosial yang ada. Gerakan ini, yang dikenal dengan label "Radikal," berusaha membongkar dan mengubah tatanan sosial yang telah lama menindas perempuan melalui pendekatan yang lebih langsung dan konfrontatif (Retnani, 2017).

Feminisme Radikal memandang negara sebagai entitas yang pada dasarnya tidak memihak, meskipun dalam praktiknya, negara lebih cenderung mencerminkan kepentingan kelompok dominan, yakni kelompok laki-laki, yang secara historis mendominasi hampir seluruh aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Konsep pluralisme negara, yang

menyatakan bahwa negara seharusnya mewakili berbagai kepentingan, dianggap oleh feminis Radikal sebagai ilusif, karena negara seringkali berfungsi untuk memperkuat kekuasaan laki-laki. Dalam pandangan ini, negara tidak lebih dari cerminan dari kepentingan maskulin yang mengendalikan kebijakan dan keputusan politik. Oleh karena itu, perempuan seringkali hanya dianggap sebagai warga negara tanpa peran yang signifikan dalam pembuatan kebijakan, sehingga terdapat ketidaksetaraan gender dalam dunia politik dan pemerintahan. Meski begitu, pandangan feminisme Liberal mengenai kesetaraan, meskipun lebih moderat, turut memberikan dampak pada pengakuan terhadap hak perempuan untuk terlibat dalam politik dan pembuatan kebijakan, meskipun prosesnya sering terhambat oleh struktur sosial yang sudah mapan (Meiliana, 2019).

Feminisme Radikal berakar pada keyakinan bahwa penindasan terhadap perempuan disebabkan oleh sistem patriarki yang mendominasi hampir seluruh aspek kehidupan. Dalam perspektif ini, tubuh perempuan dipandang sebagai objek utama eksploitasi oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme Radikal menyoroti isu-isu seperti hak reproduksi perempuan, seksualitas, termasuk lesbianisme, serta berbagai bentuk seksisme. Gerakan ini berupaya mengubah relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki, sekaligus menghapus batasan dikotomi antara ranah privat dan publik yang membatasi kebebasan perempuan. Slogan "*The personal is political*" menjadi inti pemikiran feminisme Radikal, menekankan bahwa persoalan pribadi yang dialami perempuan, yang sering dianggap tabu, sebenarnya merupakan isu politik yang lebih luas. Dalam konteks ini, feminisme Radikal membawa isu-isu seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, yang sebelumnya dianggap sebagai masalah pribadi, ke dalam ranah publik sebagai masalah

kolektif yang perlu diatasi bersama. Namun, gerakan ini kerap menghadapi tantangan berupa propaganda negatif yang berusaha mendistorsi tujuan perjuangan mereka di mata publik (Suwastini, 2013).

2.4.1.3. Feminisme Postmodern

Ideologi Postmodernisme, menurut pandangan para pendukungnya, merupakan gagasan yang menolak segala bentuk absolutisme dan otoritas. Postmodernisme dianggap lahir dari kegagalan modernitas dalam memberikan solusi menyeluruh terhadap problematika kehidupan manusia. Selain itu, aliran pemikiran ini menolak pendekatan universal terhadap pengetahuan ilmiah maupun sejarah, yang cenderung mengabaikan kompleksitas fenomena sosial. Dalam perspektif ini, setiap fenomena sosial dipahami secara berbeda-beda, tergantung pada konteks dan konstruksi makna yang terbentuk di dalamnya (Suwastini, 2013).

Salah satu aspek penting yang sering menjadi perhatian adalah konsepsi tentang gender. Bagi mereka, gender tidak dapat direduksi menjadi identitas tetap atau struktur sosial yang baku. Sebaliknya, gender dipandang sebagai konstruksi yang dinamis, terbentuk melalui interaksi sosial dan dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya, sejarah, dan lokalitas. Perspektif ini menantang narasi-narasi besar yang berusaha menguniversalkan pengalaman gender, karena pengalaman tersebut sejatinya beragam dan sarat dengan nuansa unik. Dengan demikian, Postmodernisme mengusulkan pembacaan ulang terhadap berbagai konsep yang selama ini dianggap mapan, termasuk gender, guna memberikan ruang bagi pluralitas pemahaman dan pengalaman manusia (Hariati, 2020).

2.4.1.4. Feminisme Anarkis

Feminisme Anarkisme merupakan sebuah aliran pemikiran politik yang berakar pada cita-cita pembentukan masyarakat sosialis yang egaliter dan bebas dari penindasan dalam segala bentuknya. Feminisme ini memandang bahwa keberadaan negara dan sistem patriarki yang ditandai dengan dominasi laki-laki atas perempuan dan kelompok marjinal merupakan akar dari berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, feminisme Anarkis menekankan pentingnya penghancuran struktur-struktur tersebut sebagai langkah mendasar untuk mewujudkan kebebasan dan kesetaraan sejati. Dalam pandangan ini, negara dianggap sebagai alat kekuasaan yang memperkuat hierarki dan ketimpangan, sementara patriarki dipahami sebagai sistem dominasi yang telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari keluarga hingga institusi politik dan ekonomi (Andika Tegar Pahlevi, 2022).

Feminisme Anarkisme tidak hanya menolak otoritas negara, tetapi juga menantang narasi-narasi yang melanggengkan subordinasi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Aliran ini mendorong adanya reorganisasi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip kerja sama, solidaritas, dan penghapusan hierarki, baik dalam hubungan gender maupun struktur sosial lainnya. Dengan pendekatan yang Radikal, feminisme Anarkis tidak hanya berfokus pada perjuangan melawan ketidakadilan gender, tetapi juga berupaya mengatasi akar penyebabnya yang tertanam dalam sistem kapitalisme, imperialisme, dan struktur kekuasaan lainnya. Pendekatan ini mengajak individu dan komunitas untuk membangun masyarakat alternatif yang didasarkan pada kebebasan personal, kesetaraan kolektif, dan penghormatan

terhadap keberagaman pengalaman manusia (Andika Tegar Pahlevi, 2022).

2.4.1.5. Feminisme Marxis

Aliran pemikiran ini menganalisis persoalan perempuan dalam kerangka kritik terhadap kapitalisme, dengan asumsi bahwa akar utama penindasan perempuan terletak pada eksploitasi kelas dan sistem produksi. Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Friedrich Engels, feminisme Marxis berpendapat bahwa kemerosotan status perempuan terjadi secara signifikan akibat munculnya konsep kepemilikan pribadi (*private property*). Pada awalnya, kegiatan produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu dan komunitas secara langsung, namun kemudian bergeser menjadi aktivitas yang berorientasi pada sistem pertukaran (*exchange*) (Sheyla Anastasia Soebiyantoro, 2015).

Transformasi ini memberikan laki-laki kontrol atas proses produksi dan pertukaran, yang pada gilirannya memperkuat dominasi mereka dalam hubungan sosial. Akibatnya, perempuan direduksi menjadi bagian dari properti yang dapat dimiliki dan dikendalikan. Sistem produksi yang berfokus pada keuntungan memperkuat pembagian kelas dalam masyarakat, membentuk stratifikasi antara kaum borjuis dan proletar. Dalam pandangan ini, kapitalisme tidak hanya menciptakan ketimpangan ekonomi tetapi juga memperparah subordinasi perempuan. Feminisme Marxis berargumen bahwa penindasan perempuan sangat terkait dengan struktur kelas dalam masyarakat kapitalis (Fakih, 2008).

Oleh karena itu, mereka meyakini bahwa dengan menggulingkan kapitalisme, struktur masyarakat dapat

diperbaiki, dan penindasan terhadap perempuan dapat dihapuskan sepenuhnya. Lebih jauh, kaum feminisme Marxis menilai bahwa negara merupakan perwujudan dari hubungan sosial yang kapitalistik, bukan sekedar institusi netral. Negara, dalam sistem kapitalisme, berfungsi untuk mempertahankan struktur hierarki yang mengeksploitasi kelas pekerja, termasuk perempuan. Walaupun negara memiliki kemampuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat, feminisme Marxis menekankan bahwa sifat dasarnya tetap kapitalistik, dengan memanfaatkan perempuan sebagai tenaga kerja murah dan sebagai bagian dari sistem perbudakan modern. Oleh karena itu, perjuangan feminis Marxis tidak hanya bertujuan untuk membebaskan perempuan dari eksploitasi gender, tetapi juga untuk menghapus kapitalisme sebagai sistem yang mendasari penindasan tersebut (Gimenez, 2016).

2.4.1.6. Feminisme Sosialis

Feminisme sosialis merupakan aliran pemikiran yang berlandaskan pada prinsip bahwa pembebasan perempuan tidak dapat tercapai tanpa adanya sosialisme, dan sosialisme sendiri tidak akan terwujud tanpa pembebasan perempuan. Ide ini mengusung perjuangan untuk menghapuskan sistem kepemilikan pribadi, termasuk lembaga perkawinan yang secara historis telah legitimasi dominasi laki-laki atas harta dan perempuan. Dalam pandangan ini, institusi perkawinan tradisional mencerminkan struktur patriarki yang memungkinkan suami menguasai istri sebagai bagian dari properti pribadi mereka. Sejalan dengan gagasan Karl Marx, feminisme Sosialis menginginkan terciptanya masyarakat tanpa kelas, tanpa hierarki gender, dan tanpa bentuk dominasi apa pun. Kemunculan feminisme Sosialis tidak lepas dari kritik terhadap feminisme Marxis, yang dianggap

kurang memperhatikan akar penindasan perempuan di luar kerangka kapitalisme (Nur Insani Meylawati, 2023).

Feminisme Sosialis berargumen bahwa patriarki telah ada sebelum kemunculan kapitalisme dan akan terus bertahan meskipun kapitalisme berhasil digulingkan. Oleh karena itu, perjuangan melawan kapitalisme harus disertai dengan analisis kritis terhadap patriarki sebagai sistem dominasi yang tertanam dalam budaya dan struktur sosial. Aliran ini menggabungkan analisis kelas dan gender secara bersamaan untuk memahami kompleksitas penindasan terhadap perempuan. Meski memiliki kesamaan dengan feminisme Marxis dalam mengidentifikasi kapitalisme sebagai salah satu sumber utama penindasan perempuan, feminisme Sosialis juga mengadopsi elemen dari feminisme Radikal yang menyoroti patriarki sebagai akar permasalahan. Perspektif ini menekankan bahwa kapitalisme dan patriarki merupakan dua kekuatan yang saling mendukung dan memperkuat satu sama lain (Yulistya Hermindasari, 2020).

2.4.1.7. Feminisme Poskolonial

Feminisme Poskolonial berakar pada penolakan terhadap klaim bahwa pengalaman perempuan dapat dianggap universal. Aliran pemikiran ini menekankan bahwa pengalaman perempuan sangat dipengaruhi oleh konteks geografis, historis, dan sosial di mana mereka hidup. Perempuan yang tinggal di negara-negara dunia ketiga sebagian besar merupakan bekas koloni menghadapi kenyataan yang sangat berbeda dibandingkan dengan perempuan dari dunia pertama. Selain mengalami penindasan berbasis gender, perempuan di dunia ketiga juga menanggung penindasan yang lebih kompleks, yang mencakup dimensi ras, etnis, agama, dan kolonialisme. Kolonialisme menjadi titik fokus dalam feminisme Poskolonial, yang secara

tegas mengkritik berbagai bentuk penjajahan, baik itu fisik, epistemik, maupun kultural. Penjajahan fisik merujuk pada eksploitasi sumber daya dan penguasaan wilayah, sementara penjajahan epistemik menyangkut cara pandang, nilai-nilai, dan pengetahuan yang dipaksakan oleh kekuatan kolonial. Akibatnya, mentalitas masyarakat yang terjajah seringkali dibentuk oleh narasi dominan yang menguntungkan pihak penjajah dan memperkuat hierarki sosial yang diskriminatif (Kintan Harum Puspita, 2024).

Dalam konteks ini, Beverley Lindsay, melalui bukunya *Comparative Perspectives on Third World Women: The Impact of Race, Sex, and Class*, mengungkapkan bahwa "hubungan ketergantungan yang didasarkan atas ras, jenis kelamin, dan kelas sedang dikekalkan oleh institusi-institusi ekonomi, sosial, dan pendidikan." Pernyataan ini menggambarkan bagaimana struktur kolonial tetap berlanjut melalui berbagai institusi yang memelihara ketimpangan sosial, gender, dan kelas. Institusi-institusi ini tidak hanya memperkuat dominasi bangsa bekas penjajah atas bangsa bekas jajahan tetapi juga memperparah subordinasi perempuan dunia ketiga dalam berbagai aspek kehidupan. Feminisme Poskolonial menuntut perhatian terhadap dimensi interseksional dari penindasan yang dialami perempuan dunia ketiga. Penekanan diberikan pada pentingnya mengatasi warisan kolonial yang masih memengaruhi cara masyarakat berpikir, berperilaku, dan mengorganisasi kehidupan. Melalui kritik terhadap sistem kolonial yang masih bercokol dalam institusi-institusi modern, feminisme Poskolonial berupaya membongkar hierarki yang tidak adil, sekaligus menawarkan ruang bagi beragam pengalaman perempuan yang sebelumnya terpinggirkan. Dengan demikian, aliran ini tidak hanya melawan penindasan gender tetapi juga berupaya

mendekolonisasi pikiran dan struktur sosial, agar perempuan dunia ketiga dapat membangun narasi mereka sendiri berdasarkan realitas dan kebutuhan lokal (Indah Suryawati, 2021).

2.4.1.8. Feminisme Nordic

Kaum feminis Nordic menawarkan perspektif yang unik dalam menganalisis hubungan antara feminisme dan negara, berbeda dengan pendekatan yang diusung oleh feminis Marxis maupun feminis Radikal. Pendekatan feminis Nordic lebih berfokus pada praktik-praktik mikro dalam politik dan feminisme yang bernegara, dengan menyoroti peran negara sebagai aktor penting dalam perjuangan hak-hak perempuan. Mereka berpendapat bahwa perempuan perlu "berteman dengan negara," karena negara dianggap sebagai wadah utama yang memungkinkan terwujudnya hak politik dan sosial bagi perempuan melalui kebijakan-kebijakan sosial yang inklusif. Dalam pandangan ini, negara dilihat sebagai mitra strategis dalam memperjuangkan kesetaraan gender, bukan semata-mata sebagai institusi yang mendukung struktur dominasi. Kaum feminis Nordic percaya bahwa negara memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan melalui implementasi kebijakan yang berpihak kepada perempuan, seperti perlindungan terhadap hak maternitas, kesetaraan upah, dan akses terhadap layanan publik yang mendukung partisipasi perempuan dalam berbagai sektor. Dengan demikian, mereka lebih menekankan pentingnya kolaborasi antara gerakan feminis dan institusi negara untuk mempercepat transformasi sosial yang egaliter. Pendekatan ini berbeda secara fundamental dengan feminisme Marxis, yang seringkali melihat negara sebagai instrumen kapitalisme yang memperkuat eksploitasi kelas dan gender. Feminis Radikal, di sisi lain, cenderung memandang negara sebagai perpanjangan dari

sistem patriarki yang meng institutionalisasi dominasi laki-laki atas perempuan. Sebaliknya, feminis Nordic memanfaatkan struktur negara sebagai alat untuk mendorong perubahan progresif melalui kebijakan yang memberdayakan perempuan (Fernanda, 2022).

Keberhasilan negara-negara Nordic dalam menciptakan masyarakat yang lebih setara seringkali dikaitkan dengan pendekatan ini. Misalnya, berbagai kebijakan sosial di negara-negara seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark dirancang untuk mengurangi ketimpangan gender dan memberikan akses yang lebih besar bagi perempuan ke dalam ruang publik, termasuk dalam dunia kerja dan politik. Dengan menjadikan negara sebagai sekutu dalam perjuangan feminis, pendekatan ini menunjukkan bahwa negara bukan hanya arena konflik, tetapi juga dapat menjadi sarana penting untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih konkret dan terukur (Hariati, 2020).

Dari delapan aliran feminisme yang beragam, feminisme Liberal menjadi pusat perhatian yang paling menonjol dalam serial *Anne with an E* Season 3. Hal ini terlihat jelas melalui konflik yang dihadapi oleh tokoh-tokoh feminis dalam serial tersebut, yang secara konsisten menekankan perjuangan untuk mengubah pandangan tradisional terhadap perempuan. Serial ini menggambarkan bagaimana perempuan berusaha untuk melepaskan diri dari stigma sosial yang memposisikan mereka sebagai subordinat laki-laki, dan berupaya menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk mandiri, berpikir kritis, dan bertindak setara dengan laki-laki, asalkan diberikan peluang yang setara. Anne, sebagai tokoh utama, menjadi simbol perjuangan feminisme Liberal dengan menantang norma-norma patriarkal di komunitas Avonlea. Ia berusaha membuktikan

bahwa perempuan layak memperoleh hak yang sama dalam pendidikan, akses terhadap peluang karir, dan kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Sikapnya yang penuh semangat, percaya diri, dan berani menyuarakan pendapat tidak hanya menjadi perlawanan terhadap ketidakadilan gender, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitarnya untuk mempertanyakan tatanan sosial yang ada (Pitria Wulan Dari, PERJUANGAN IDENTITAS DAN EMANSIPASI PEREMPUAN: ANALISIS KARAKTER ANNE SHIRLEY DALAM KONTEKS GENDER DAN ANAK DI ABAD KE-19, 2024).

Melalui karakter Anne dan tokoh perempuan lainnya, serial ini menggambarkan bahwa feminisme Liberal tidak sekedar menuntut kesetaraan hak, tetapi juga berupaya memecah tembok stereotip yang selama ini membatasi peran perempuan dalam masyarakat. Dengan menggambarkan bahwa perubahan dapat dimulai dari lingkungan sosial yang kecil, Anne with E Season 3 menyampaikan pesan penting tentang potensi perempuan yang tidak terbatas dan perlunya memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk berkembang dan bersinar (Celina Natalia Sitorus, 2020).

2.5. Teori Semiotika Roland Barthes

Pada tahun 1956, Roland Barthes, dalam membaca karya Saussure: *Cours de linguistique générale*, menemukan potensi besar dalam menerapkan konsep semiotika ke dalam berbagai bidang ilmu lainnya. Dengan pandangannya yang berbeda dari Saussure, Barthes melihat linguistik sebagai bagian integral dari semiotika, bukan sebaliknya seperti yang diyakini Saussure. Bagi Barthes, tanda-tanda dalam berbagai bidang tersebut dapat dianggap sebagai bahasa, yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan gagasan dan memiliki makna yang terbentuk dari unsur-unsur penanda-petanda yang terstruktur (Irawa, 2023).

Dalam semiologi Barthes, denotasi dipandang sebagai sistem signifikasi tingkat dasar, sementara konotasi merupakan tingkat yang lebih tinggi. Barthes menolak dominasi makna harfiah yang cenderung menutup diri, dan mengadvokasi keberadaan konotasi sebagai aspek yang lebih penting. Baginya, makna harfiah lebih merupakan konstruksi alami yang diterima melalui proses signifikasi. Pendekatan teoritis Barthes ini merujuk pada konsep tanda yang pertama kali diajukan oleh Ferdinand de Saussure, namun dengan penekanan pada proses interpretasi yang berlangsung melalui dua tingkatan, sebagaimana tergambar dalam skema berikut.

Gambar 2.2. Macam-macam Tanda

1. Penanda (<i>Signifier</i>)	2. Petanda (<i>Signified</i>)
3. Tanda Denotatif (<i>Denotatif Sign</i>)	
4. Penanda Konotatif (<i>Connotative Signifier</i>)	5. Petanda Konotatif (<i>Connotative Signified</i>)
6. Tanda Konotatif (<i>Connotative Sign</i>)	

Sumber: (Irawa, 2023)

Denotasi merupakan pemaknaan langsung atau primer dari suatu kata, yang umumnya sejalan dengan definisi yang tercantum dalam kamus atau karya sastra lainnya, dan tidak mengandung makna tambahan atau tersembunyi (Sari, 2018). Sebaliknya, konotasi adalah tingkatan kedua yang melahirkan makna secara tidak langsung atau ambigu, seringkali dikaitkan dengan aspek psikologis, emosional, atau kepercayaan. Selanjutnya, mitos dapat diinterpretasikan sebagai konstruksi bahasa atau makna yang beragam, dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya dan pandangan yang berlaku di masyarakat sekitarnya.

Dalam rangkaian ini, penting untuk memahami bahwa tanda, baik dalam bentuk visual maupun verbal, membawa makna yang tersirat maupun yang tersurat, yang berperan krusial dalam proses komunikasi yang efektif (Effendy, 1986).

Manusia memiliki berbagai media yang menyampaikan informasi dan pesan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah film.

2.6. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana “Serial Anne with E Season 3” menggambarkan unsur-unsur makna feminisme Liberal dalam memperjuangkan hak-hak sebagai perempuan feminis yang terjebak dalam lingkungan yang membatasi hak perempuan dan keadilan bagi kaum perempuan. Unsur feminisme yang di munculkan sudah ada pada series pertama pada serial tersebut tetapi unsur feminisme paling menonjol pada series ke 3 Anne with E (Julianti, 2024).

Peneliti menggunakan teori Semiotika Roland Barthes dimana pada teori tersebut menggunakan pemaknaan dua tahap yaitu two orders signification dengan menggambarkan serial secara makna konotasi dan denotasi serta mitos. Konotasi digambarkan sebagai signifikasi dua tahap ketika tanda sudah tercampur dengan perasaan atau emosi. Sedangkan denotasi yaitu makna mutlak yang berhubungan dengan petanda dan penanda dalam bentuk nyata (Armeta Huril Hasanah, 2023).

Demi kelancaran penelitian, peneliti telah menetapkan kriteria untuk mengumpulkan data berupa indikasi scene yang akan dimasukkan dalam penelitian, yaitu:

1. Memerlihatkan adegan atau dialog yang menunjukkan perjuangan entitas perempuan sebagai sosok feminis yang memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan
2. Memerlihatkan ketidakadilan dalam berpendapat bagi kaum perempuan
3. Memerlihatkan adanya adegan dan dialog dukungan feminisme oleh sesama kaum perempuan

2.7. Asumsi Dasar Penelitian

Asumsi penelitian atau prinsip dasar ini melambangkan interpretasi, prediksi, pandangan, atau kesimpulan tertentu. Dalam perspektif Tim Penyusun PPKI (Didin Komarudin, 2019), asumsi penelitian merujuk pada keyakinan awal

mengenai suatu fenomena yang menjadi landasan bagi pemikiran dan tindakan dalam proses penelitian. Dalam konteks ini, peneliti mengekspos dasar-dasar pemikirannya dari sudut pandang tersebut, melalui penjabaran yang terperinci sebagai berikut:

1. Pesan feminisme dalam serial Anne with E lebih cenderung pada aliran feminisme Liberal dimana diskriminasi perempuan dalam serial Anne with E mengarah pada diskriminasi pendidikan, lingkungan sosial, berpendapat, dan berpolitik.
2. Dalam serial ini, digambarkan adanya penegakan terhadap hak-hak, kesetaraan, martabat dan kebebasan kaum perempuan dalam berpendidikan, berpendapat dan berpolitik. Penegakan ini menggambarkan upaya yang dilakukan sebagai bentuk perlawanan ketidakadilan gender dan bentuk memperjuangkan kesetaraan hak hak bagi perempuan.
3. Para perempuan pada serial ini sebagai tokoh pejuang feminisme. Hal ini digambarkan melalui serangkaian usaha untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai perempuan yang tidak mereka dapatkan sepenuhnya karena serba dibatasi oleh faktor lingkungan yang menjadikan perempuan sebagai bawahan laki-laki dan tidak dapat setara dalam segala bentuk apapun.